



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADAMS YOGASARA**
2. Jabatan : **SENIOR SPESIALIS DISTRIBUSI**
3. NHK : **414251**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 10.347.016.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m²/238 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/80 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 302 m²/210 m² di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 950.000.000
4. Tanah Seluas 500 m² di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 700.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 384 m²/272 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.211.520.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/70 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 860.496.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.202.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOBIL, HONDA SUV CRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000



5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	338.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	547.559.574
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.435.275.574
III. HUTANG	Rp.	150.749.793
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.284.525.781

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.